

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PADA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan skripsi
pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
MUHAMMAD ILHAM
NPM: 20.22.536**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Muhammad Ilham
NPM : 212308536
Program Studi : Administrasi Publik
: IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN
Judul Skripsi : PERTANIAN (BPP) TEBING TINGGI KABUPATEN
BALANGAN

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Arpandi, M. AP
NUPTK. 5733766667230302


Herry Febriadi, SH.MH.CPRM
NUPTK. 6360769670230353

Mengetahui



Ketua Program Studi Administarsasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan”**.

Terwujudnya Proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, M.AP Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P Selaku Pembimbing 1 yang telah banyak membantu memberikan pengarahan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak Herry Febriadi, SH, MH. CPRM. Selaku Pembimbing 2 yang telah banyak membantu memberikan pengarahan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Seluruh keluarga dan teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis memohon maaf jika dalam pembuatan proposal skripsi ini terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan penulis dan akan diperbaiki dikemudian hari. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Amuntai, 2026

Muhammad Ilham

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Tipe Penelitian.....	20
D. Data dan Sumber Data.....	21
E. Desain Operasional Penelitian.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik Analisis Data	25
H. Uji Kredibilitas	26

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	20
Tabel 3.2	Desain Operasional Penelitian	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	17
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia karena berperan penting dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara agraris, sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung kegiatan pertanian, mulai dari lahan yang subur hingga iklim tropis yang memungkinkan produksi sepanjang tahun. Oleh karena itu, sektor pertanian tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya produktivitas akibat penggunaan teknologi yang belum optimal serta keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian modern. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman juga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sektor ini. Permasalahan lain seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses pasar turut memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan usaha pertanian di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Upaya tersebut meliputi penyediaan subsidi pupuk, pengembangan teknologi pertanian,

peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani. Selain itu, penerapan konsep pertanian berkelanjutan juga mulai digalakkan untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih optimal.

Penyuluhan pertanian di Indonesia merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Penyuluhan pertanian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Secara umum, penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha agar mereka mampu mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan usaha tani. Dalam UU No. 16 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penyuluhan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga mendorong petani untuk aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Sistem penyuluhan pertanian melibatkan berbagai kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah membentuk lembaga penyuluhan seperti Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat pula tenaga penyuluh pertanian yang terdiri dari penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya. Peran penyuluh sangat strategis karena menjadi jembatan antara pemerintah, lembaga penelitian, dan petani dalam mentransfer inovasi dan teknologi pertanian.

Lebih lanjut, peraturan ini juga menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam kegiatan penyuluhan. Setiap program penyuluhan harus disusun berdasarkan kebutuhan petani dan kondisi wilayah setempat, sehingga hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program serta sebagai dasar perbaikan di masa mendatang. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan penyuluhan pertanian di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian secara keseluruhan.

Program penyuluhan pertanian di Indonesia merupakan rangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani agar mampu mengelola usaha tani secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Program ini menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian karena berfungsi sebagai sarana transfer inovasi dan teknologi dari pemerintah maupun lembaga penelitian kepada petani sebagai pelaku utama. Melalui program penyuluhan, diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, serta kesejahteraan hidupnya.

Secara umum, program penyuluhan pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah, sehingga setiap daerah memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan kondisi lokalnya. Program ini biasanya mencakup

beberapa kegiatan utama seperti penyuluhan teknis budidaya, pengendalian hama dan penyakit tanaman, penggunaan pupuk yang tepat, serta penerapan teknologi pertanian modern. Selain itu, penyuluhan juga mencakup aspek manajemen usaha tani, seperti perencanaan produksi, pemasaran hasil pertanian, dan pengelolaan keuangan, sehingga petani tidak hanya mampu memproduksi tetapi juga mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Program penyuluhan pertanian dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode langsung meliputi pertemuan kelompok tani, demonstrasi lapangan (demplot), pelatihan, dan kunjungan individu oleh penyuluh. Sementara itu, metode tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa, seperti radio, televisi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Pendekatan kelompok tani sering digunakan karena dinilai lebih efektif dalam mendorong partisipasi dan pertukaran pengalaman antarpetani.

Keberhasilan program penyuluhan pertanian sangat bergantung pada peran aktif penyuluh dan partisipasi petani. Penyuluh berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu petani dalam mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi yang tepat. Di sisi lain, petani diharapkan berperan aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan menerapkan inovasi yang diberikan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan program penyuluhan, yaitu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Implementasi program penyuluhan pertanian di Indonesia merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani

melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pelaksanaan program ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menekankan pentingnya penyuluhan sebagai sarana pemberdayaan petani. Dalam praktiknya, implementasi penyuluhan dilakukan melalui perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah, sehingga materi yang disampaikan relevan dengan kondisi agroekosistem dan permasalahan yang dihadapi petani setempat.

Penyuluhan pertanian dilakukan oleh tenaga penyuluh melalui berbagai metode, seperti pertemuan kelompok tani, demonstrasi plot (demplot), pelatihan teknis, serta kunjungan lapangan. Penyuluh berperan sebagai fasilitator yang menjembatani informasi dan inovasi dari pemerintah maupun lembaga penelitian kepada petani. Selain itu, implementasi program juga didukung oleh kelembagaan seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan yang menjadi pusat kegiatan penyuluhan. Pendekatan partisipatif menjadi kunci utama, di mana petani tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Tebing Tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah penyuluh, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Program penyuluhan belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga serta rendahnya partisipasi petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar

implementasi program penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana implementasi program tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan implementasi program tersebut.

Setelah melakukan pengamatan sementara mengenai Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Maka dapat diketahui beberapa fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu:

1. Di lapangan, penyampaian informasi program penyuluhan pertanian sering tidak berjalan efektif. Penyuluh belum sepenuhnya mampu menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh petani, terutama terkait inovasi teknologi pertanian terbaru. Selain itu, frekuensi komunikasi yang terbatas serta kurangnya media penyuluhan (seperti leaflet atau demonstrasi langsung) menyebabkan informasi yang diterima petani menjadi tidak lengkap. Akibatnya, banyak petani yang masih menggunakan cara tradisional karena kurang memahami manfaat program yang disampaikan. (*Sumber: Observasi Lapangan*)
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan. Banyak penyuluh pertanian yang belum memiliki fasilitas memadai seperti

alat peraga, media penyuluhan, maupun teknologi informasi yang dapat menunjang penyampaian materi kepada petani. Kondisi ini menyebabkan proses transfer pengetahuan menjadi kurang efektif dan kurang menarik bagi petani. Transportasi operasional bagi penyuluh juga menjadi kendala utama. Di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, penyuluh kesulitan menjangkau lokasi kelompok tani karena minimnya kendaraan dinas atau akses jalan yang kurang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya frekuensi kunjungan penyuluh ke lapangan sehingga program penyuluhan tidak berjalan secara optimal. (*Sumber: Observasi Lapangan*)

3. Masih rendahnya pemahaman penyuluh pertanian terhadap substansi kebijakan program penyuluhan menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya penyuluh yang hanya menjalankan kegiatan secara rutinitas tanpa mengacu pada tujuan strategis program, sehingga hasil penyuluhan kurang optimal dalam meningkatkan kapasitas petani. Sebagian penyuluh pertanian belum sepenuhnya memahami isi dan arah kebijakan penyuluhan yang dikeluarkan pemerintah, terutama terkait metode penyuluhan partisipatif. Akibatnya, pendekatan yang digunakan masih bersifat satu arah (top-down), sehingga partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan menjadi rendah dan tujuan pemberdayaan tidak tercapai secara maksimal. (*Sumber: Observasi Lapangan*)

4. Struktur organisasi yang kurang jelas dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut mempengaruhi pelaksanaan program penyuluhan. Terkadang terjadi tumpang tindih tugas antara instansi terkait, serta

kurangnya kejelasan alur komando dalam pelaksanaan program. Selain itu, prosedur birokrasi yang terlalu panjang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini menyebabkan program penyuluhan menjadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

(Sumber: Observasi Lapangan)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian dengan judul **“Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan”** sangat tepat dilakukan untuk mengevaluasi program penyuluhan serta memberikan masukan atau saran untuk meningkatkan program tersebut.

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Adapun indikator penelitian implementasi program yang dipakai untuk penelitian ini adalah menurut George C. Edward III (Nia Ramadhani 2025) yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor apa Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya

dalam bidang Ilmu Administrasi Publik serta dalam hal yang berhubungan dengan budaya organisasi dan Kinerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Balai Penyuluhan Pertanian Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dalam upaya penerapan penyuluhan pertanian di Tebing Tinggi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Joko Sumaryono, Nadira, Poiran, Teta Wismar, Sasmita Rusnaini (2021) dalam penelitian yang berjudul “*Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Kota Muara Tebo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo)*”. STIA Setih Setop Muaro Bungo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penghijauan terhadap keindahan Kota Kabupaten Tebo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program penghijauan terhadap keindahan Kota Kabupaten Tebo masih belum optimal dan masih belum memenuhi standar minimal luas RTH dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni sebesar 30% luas RTH. Hadapan yang dihadapi oleh dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program penghijauan terhadap keindahan Kota Kabupaten Tebo yakni: masih kurangnya dana dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Tebo. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pemeliharaan rutinitas taman dan mencari sumber dana alternatif untuk perbaikan.
2. Deddy Hutapea (2018) dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Medan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan).

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Medan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan memiliki permasalahan kompleks seperti sebaran RTH yang tidak merata, kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik, fasilitas penunjang kenyamanan yang seadanya, dan luas lahan yang dimanfaatkan sebagai RTH belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya diketahui sebagai berikut: 1. Jumlah dan keadaan RTH yang terdapat di kota Medan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Produk kebijakan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 belum berjalan secara konsisten dengan peraturan lain yang sejenis. 3. Pelibatan masyarakat kota Medan dalam menyukseskan kebijakan RTH masih sekedar partisipator program.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan Publik merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama yang diimpikan. Dalam konteks cita-cita Bangsa Indonesia, tujuan tersebut adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan serta Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan publik mencakup segala prasarana dan sarana yang

diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, yang bersifat berdasarkan hukum, bukan sekadar pada kekuasaan (B. A. B. Ii & Pustaka, 2003).

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai panduan dalam menangani isu-isu publik. Kebijakan ini memiliki tujuan, rencana, dan program yang jelas untuk dilaksanakan. (Africa, 2011).

Kebijakan merupakan produk dari pemerintahan dan administrasi negara, yang berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi tercapainya berbagai hasil. Oleh karena itu, kebijakan lebih dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dibandingkan dengan proses yang melahirkan hasil-hasil tersebut (Miftah Thoha, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang terjadi setelah penetapan Undang-Undang. Maksudnya, implementasi kebijakan mengacu pada pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan (Rondius, 2012).

Menurut Riant Nugroho implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam proses implementasi kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil: pertama, melakukan implementasi secara langsung dalam bentuk program dan kedua, melalui formulasi kebijakan derivatif yang berfungsi sebagai penjelasan atau peraturan pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan desain, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan ini juga tercermin dari dampak positif yang dihasilkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi ini, penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai, serta komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tersebut (Tangkilisan, 2004).

Keberhasilan implementasi juga memerlukan adanya mekanisme dan prosedur yang jelas di dalam lembaga. Hal ini akan meningkatkan peluang bagi pejabat-pejabat tingkat atas untuk mendorong bawahannya agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan kebijakan yang ada.

Model implementasi program yang diajukan oleh David C. Korten 1998 mencakup tiga elemen utama yang dirumuskan dalam konsep kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menekankan bahwa model ini terdiri dari tiga aspek kesesuaian yang melibatkan program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran yang dituju oleh program tersebut.

Menurut Korten, keberhasilan suatu program tergantung pada adanya kesesuaian di antara ketiga unsur implementasi. Pertama, terdapat kesesuaian antara program dan kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, penting untuk memastikan kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yakni kesesuaian antara tugas yang ditentukan oleh program

dengan kemampuan organisasi yang melaksanakannya. Ketiga, kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana juga krusial, agar hasil yang dicapai oleh program dapat sejalan dengan apa yang mampu dilakukan oleh kelompok sasaran tersebut (Akib, 2010).

2. Pengertian Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program didefinisikan sebagai sebuah rancangan yang mencakup prinsip dan usaha, baik dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, maupun aspek lainnya yang akan dilaksanakan. Program dapat diibaratkan sebagai suatu perintah yang ditujukan untuk melaksanakan fungsi atau tugas tertentu dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap program dirancang secara spesifik dan dilengkapi dengan rangkaian instruksi yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurut Suharsimi Arikunto definisi program dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu definisi umum dan khusus. Dalam definisi umum, program dijelaskan sebagai rencana aktivitas yang akan dilaksanakan oleh individu di masa yang akan datang. Sementara itu, secara khusus, program diartikan sebagai evaluasi suatu unit atau kesatuan aktivitas yang merupakan hasil atau implementasi dari suatu kebijakan. Hal ini berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sedangkan Menurut John L. Herman menjelaskan bahwa program adalah suatu tindakan yang direncanakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh dan hasil di masa depan. Program juga dapat digambarkan sebagai

sesuatu yang bersifat nyata (tangible), seperti materi kurikulum, maupun sesuatu yang tidak bersifat nyata (intangible) seperti prosedur atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk meningkatkan mutu peserta didiknya. Dalam melaksanakan suatu program, penting untuk terlebih dahulu memahami jenis-jenis program yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, termasuk tujuan, jenis, jangka waktu, sifat, serta ruang lingkup pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Umumnya, sebuah program terdiri dari serangkaian kegiatan, dan untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya, penting untuk mempertimbangkan prosedur serta langkah-langkah yang harus diambil.

3. Peran Balai Penyuluhan Pertanian

Definisi penyuluhan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) menggambarkan penyuluhan sebagai suatu proses pembelajaran bagi para pelaku utama dan pelaku usaha. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar mereka dapat membantu dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi mengenai pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Dengan demikian, diharapkan penyuluhan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan mereka, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan (Yoyon, 2022).

Dalam definisi lain Istilah "penyuluhan" berasal dari kata "suluh," yang berarti obor atau pelita yang memberikan penerangan. Melalui proses ini, diharapkan terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Peningkatan pengetahuan ditandai dengan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, serta dari yang sudah tahu menjadi lebih banyak tahu. Keterampilan dapat dikatakan meningkat jika individu yang awalnya tidak mampu melakukan suatu pekerjaan bermanfaat, kini menjadi mampu. Sementara itu, sikap dianggap berkembang jika seseorang yang awalnya tidak mau, berpindah menjadi mau memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam melaksanakan tugasnya koordinator BPP dan penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi secara fungsional mempunyai hubungan kerja (Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Penyuluhan Pertanian)

Peran BPP dalam kerangka Konstratani telah berkembang menjadi beberapa aspek penting, antara lain:

1. BPP berperan sebagai pusat data dan informasi untuk memastikan tersedianya data pertanian yang akurat.
2. Sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan pertanian, BPP melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap masyarakat tani.
3. BPP juga berperan sebagai pusat pembelajaran, dengan harapan hasil produksi padi dan panen lainnya dapat terus meningkat.

4. BPP menyediakan layanan konsultasi untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan wawasan para petani.
5. BPP berperan dalam membangun kerjasama dan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak lain, guna mengembangkan bisnis di bidang pertanian.

C. Kerangka Pemikiran

Model implementasi program mencakup empat elemen utama yang dirumuskan dalam konsep kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. George C. Edward III menekankan bahwa model ini terdiri dari tiga aspek kesesuaian yang melibatkan program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran yang dituju oleh program tersebut, diperlukan suatu indikator sebagai berikut yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Rambung Raya, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, kode pos 71667.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:59) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Menurut Sahya Anggara (2015:21) Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

Tipe penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian

yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak di setting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan secara jelas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya

Kemudian, desain studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sebuah keterangan atau subjek yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian agar mendapatkan data-data yang objektif, data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Berikut data primer dan data sekunder dalam penelitian ini:

a. Data Primer

informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data ini mencakup narasumber dan pengamat yang berperan sebagai informan, serta individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program pendampingan petani.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen kantor (sumber yang ada). Berupa data gambaran umum kantor, struktur organisasi beserta tugas masing-masing yang relevan dengan objek penulis.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber datanya berupa informan. Informan merupakan orang yang memberi informasi terkait objek atau fenomena yang diteliti dengan cara menjawab pertanyaan, baik tulisan maupun lisan.

Sumber data pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022:95), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti meneliti objek atau fenomena yang akan diteliti. Informan yang akan diambil sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlsh
1	Koordinator BPP Tebing Tinggi	1
2	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	4
3	Ketua Kelompok Tani	3
4	Anggota Kelompok Tani	4

Sumber: Diolah Peneliti 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan panduan langkah-langkah sistematis yang dilakukan peneliti mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaporan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2019), desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, desain operasional membantu peneliti melaksanakan penelitian secara terarah, logis, dan efisien.

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Program Penyuluhan Pertanian George C. Edward III (Nia Ramadhani 2025)	Komunikasi	1. Kesesuaian informasi 2. Intensitas pertemuan/penyuluhan antara penyuluh dan petani 3. Penggunaan media (tatap muka, kelompok tani, media digital, dll.)
	Sumber Daya	1. Jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian 2. fasilitas pendukung (alat peraga, lahan demonstrasi, transportasi, dll.)
	Disposisi/Sikap Pelaksana	1. Pemahaman penyuluh terhadap program 2. Penyuluh ampu merespon kebutuhan petani
	Struktur Birokrasi	1. adanya monitoring dan penilaian terhadap kegiatan penyuluhan 2. kejelasan pedoman pelaksanaan penyuluhan

Sumber: Diolah Peneliti 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara ataupun metode yang digunakan untuk penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi atau data-data yang diperlukan. Dan teknik ini penting untuk memastikan data yang valid dan reliabel. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut (Sugiyono, 2019:224)

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari semua informan yang ada mengenai implementasi program. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi dan respons informan. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami pengalaman, implementasi program penyuluhan pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penyuluhan di lokasi penelitian. Peneliti memperhatikan aspek-aspek seperti perilaku petugas, sarana dan prasarana pelayanan, serta interaksi antara petugas dan masyarakat. Teknik ini membantu peneliti memperoleh gambaran nyata tentang kondisi lapangan yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung hasil wawancara dan observasi, laporan kegiatan, foto kegiatan penyuluhan, serta dokumen resmi lainnya dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung dan pelengkap agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara deskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi program tersebut. Miles dan Huberman dalam (Zuchri Abdussamad 2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data kondensasi data, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan implementasi program, khususnya berdasarkan tiga dimensi implementasi. Data yang tidak relevan dieliminasi agar fokus penelitian tetap terjaga.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel tematik, dan kutipan langsung dari hasil wawancara agar mudah dipahami serta menunjukkan hubungan antarvariabel.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Peneliti menarik makna dan pola dari hasil analisis serta memverifikasi temuan dengan cara membandingkan data antar-informan dan hasil observasi lapangan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data.

H. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa: Uji kredibilitas data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya dan menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan. Kredibilitas menjadi kunci utama dalam penelitian kualitatif karena validitas hasil penelitian tidak diukur dengan angka, melainkan dengan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dari informan.

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti terlibat secara langsung dan cukup lama di lapangan untuk memahami kondisi sosial dan situasi penyuluhan pertanian, sehingga dapat membangun kepercayaan dengan informan serta memperoleh data yang akurat.

2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap proses penyuluhan agar memahami fenomena yang terjadi secara menyeluruh.

3. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Misalnya, membandingkan hasil wawancara masyarakat dengan penyuluh, serta memverifikasi data dengan dokumen pelayanan resmi lainnya.

4. *Member Check*

Hasil sementara penelitian dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi peneliti tidak menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Budihardjo. 2017. *Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

Africa, S., (2011). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal. 66(July), 6–17.

Benno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Braz Dent J*33(1), 1–12.

Charles O. Jones.1996. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: *AnIntroduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri AbadiOffset.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Ellitan. (2009). Strategi Pendampingan Dalam Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat. 19(19), 19.

Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Implementasi Konsep Pendampingan Keluarga. 2004, 8–41.

Harbani, Pasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

Hendry, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2(1), 1–10.

Humadi, L., Hubeis, A. V. S., Puspitawati, H., & Anwas, E. O. M. (2020). Pemanfaatan media sosial dan peran kelembagaan penyuluhan dalam peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. *Repository IPB*.

Ibrahim, A., Haq, A., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). Metodologi Penelitian. In *Gunadarma Ilmu* (Vol. 6, Issue. 1).

- Ibrahim, Yunus. (1999), *Bekerja Bersama Masyarakat*, Buku Saku Konsultan Pendamping, Jayagiri, Swadamas.
- Ii, B. (2011). *Imple.me.ntasi Kebijakan Publik*. 14–53.
- Ii, B. (2012). *Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. 8–29.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2003). *Formulasi Kebijakan Wahab* (2001:17) mengemukakan bahwa: 1–23.
- Isnaini, A., & Winarno, B. (2021). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat: Studi atas teori David C. Korten dalam program Pamsimas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 231–245.
- Khuseno, M. T. (2019). Pengaruh pelatihan dan lingkungan organisasi terhadap kompetensi serta dampaknya terhadap kinerja penyuluh pertanian [Artikel]. *Agri- Sosioekonomi*, 15(3).
- Mazmanian, Daniel H., & Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Margono, Slame.t. (2000). *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*. Pustaka Wira Usaha Muda.
- Marlinah, S., & Yuliana, R. (2022). Analisis Efektivitas Peran Penyuluh Pertanian terhadap Petani. *Jurnal Pertanian Tropik*, 9(1), 45–52).
- Miyarnis, D. S., Budiwan, D. W., & lainnya. (2024). Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan pemupukan tanaman padi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AGROPLASMA*.
- Mole.ong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya
- Nugroho, Riant. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwadarmenta. (2000). *Model Pembelajaran Pendampingan*. BPPLSP Jayagiri. Lembang.
- Purwanto, A. E., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat: Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ummah, M. S. (2019). Implementasi Program Petani Bangkit Guna Meningkatkan Pendapatan Petani di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Andri. *Sustainability* (Switzerland), 11(1), 1–14.
<http://sciote.ca.caf.com/bitstre.am/handle/123456789/1091/RE.D2017-E.ng8e.ne.pdf?se.que.nce.=12&isAllowe.d=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.re.gsci>
 urbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.re.se.archgate.ne.t/publication/305320484_Sistem_Pembentungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Tjokrowinoto, N. (2013). Alat bantu dan peraga penyuluhan pertanian. Dalam *Penyuluhan Pertanian* (edisi revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B. (2011). Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus (T. Admojo, E.d.). CAPS (Center of Academic Publishing Service).